

**EVALUATION OF LOCAL GOVERNMENT TAX ACCOUNT
RECEIVABLES QUALITY GRADING POLICY
(A Case Study at Yogyakarta Municipal and Bantul Regency)**

ABSTRACT

This research is aimed to know the considerations which lead the Yogyakarta and Bantul government in deciding tax account receivables quality grading. The object of research is the decision of tax account receivables quality grading which is written in the Mayor policies regarding finance policies. This research was done to answer a question of what considerations that lead the Yogyakarta and Bantul regency government in deciding the tax account receivables quality grading policies.

This research applied a qualitative method with a case study approach. The primary data of this research is earned by a depth interview and the secondary data is taken from relevant supporting documents. The data were analyzed using Miles & Huberman (1994) analysis method. Furthermore, this research using a descriptive analysis to give illustration of the research problems and to answer the question. After knowing the considerations which underlie the tax account receivable quality grading, the writer evaluated the factors by comparing it with the standard criteria through experts' opinion regarding the factors that needs to be considered during the tax account receivables quality grading policies.

The research results show that considerations which being used by Yogyakarta and Bantul government in deciding the tax account receivables quality grading is based on intuitive judgment, past experiences, tax acts, and refer to other institutions. Furthermore, there are factors that need to be considered in deciding the tax account receivable quality grading policies such as the specific acts which contains more power; the understanding of unpaid account receivable policies from financial point of view; tax receivable aging; collectability of tax receivable; tax characteristics; past experiences; and tax receivable management.

The research scope of study is limited on financial policies of tax receivable specifically on receivable age grading which is done by Yogyakarta and Bantul government. The results may vary if it is applied to others local government.

Key Words: Financial Policies Tax Account Receivables, Tax receivable quality grading

**EVALUASI PENENTUAN KEBIJAKAN GRADING KUALITAS PIUTANG
PAJAK PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Pada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul)

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam menentukan kebijakan *grading* kualitas piutang pajak. Obyek penelitian ini adalah penentuan kebijakan *grading* kualitas piutang yang telah dituangkan dalam Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan *grading* kualitas piutang pajak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis model Miles & Huberman (1994). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran tentang masalah penelitian dan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah mengetahui pertimbangan yang mendasari dalam penentuan *grading* kualitas piutang pajak, kemudian dilakukan evaluasi dengan membandingkan dengan kriteria yang seharusnya melalui pendapat ahli tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan *grading* kualitas piutang pajak daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam menentukan kebijakan *grading* kualitas piutang pajaknya adalah berdasarkan intuisi (*judgment*), pengalaman masa lalu, peraturan perundang-undangan, dan mengacu pada instansi lain. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan *grading* kualitas piutang pajak Pemerintah daerah adalah peraturan perundang-undangan di atasnya; pemahaman kebijakan penyisihan piutang tak tertagih dari segi akuntansi; umur piutang pajak; kolektibilitas piutang pajak; karakteristik jenis pajak; pengalaman masa lalu; dan pengelolaan piutang pajak.

Lingkup penelitian ini hanya terbatas pada kebijakan akuntansi piutang pajak khususnya *grading* kualitas umur piutang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Hasil penelitian kemungkinan akan berbeda jika dilakukan pada Pemerintah Daerah yang lainnya.

Kata Kunci: Kebijakan Akuntansi Piutang Pajak Daerah, Grading Kualitas Piutang Pajak.